

KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH DANA BAGI HASIL DAN BELANJA LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Desak Putu Dwi Puspaningsih¹
Ni Ketut Lely Aryani. M.²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: sakwik03@yahoo.com telp: 081547129818

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tinggi rendah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah memerhatikan sumber-sumber penerimaan dan realisasi belanja khususnya dana bagi hasil dan belanja langsung, selanjutnya kinerja keuangan daerah dipandang perlu guna mengalokasikan realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris kinerja keuangan daerah sebagai pemoderasi pengaruh dana bagi hasil dan belanja langsung pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa dana bagi hasil dan belanja langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh dana bagi hasil dan belanja langsung dapat dimoderasi dengan arah positif oleh variabel kinerja keuangan daerah, sekaligus memperkuat pengaruh dana bagi hasil dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *dana bagi hasil, belanja langsung, kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi*

ABSTRACT

High-low level of regional economic growth noticed sources of revenue and expenditure, especially revenue-sharing and direct spending, further regional financial performance is deemed necessary, in order to allocate expenditures to the realization of the reception area is so efficient. This study aimed to get empirical evidence of financial performance as the moderating influence of local revenue-sharing and direct spending on economic growth in the District/City of Bali Province. Data collection method used was non-participant observation. The sampling method in this study is saturated samples. The analysis technique used is Moderated Regression Analysis. The analysis showed that the revenue-sharing and shopping direct positive effect on economic growth. Effect of revenue-sharing and direct spending can be moderated by the positive direction by the variable region's financial performance, while strengthening the influence of revenue-sharing and direct spending to economic growth.

Keywords: *revenue-sharing, direct expenditure, financial performance, economic growth*

PENDAHULUAN

Tingkat kesejahteraan merupakan acuan utama yang mendeskripsikan bagaimana sebuah negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu mistar

pengukur yang digunakan untuk melihat sekaligus meramalkan perkembangan sebuah Negara. Pertumbuhan ekonomi menitikberatkan pada laju produksi jasa dan barang dalam periode tertentu, yang dihitung dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indonesia adalah Negara dengan angka pertumbuhan ekonomi yang baik dengan 34 Provinsi yang berdiri di dalamnya. Provinsi Bali adalah bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi tertinggi, khususnya Kabupaten Badung. Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu kawasan wisata yang memiliki daya potensi di bidang seni, budaya dan keindahan alamnya sehingga daya tarik wisata dijadikan sebagai tulang punggung utama Provinsi Bali. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah di Bali, dimana laju pertumbuhan ekonomi lebih difokuskan pada wilayah Bali selatan khususnya Badung (Kandia, 2013; Indrabayu, 2013; Edison, 2015). Berikut adalah data PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013 yang dipaparkan dalam Tabel 1. Pada Tabel 1 tingkat PDRB Provinsi Bali tahun 2013 didominasi oleh Bali selatan, yaitu Kabupaten Badung dan Denpasar dengan angka masing-masing sebesar Rp.7.170.966,00 dan Rp.6.962.611,00. Selanjutnya PDRB terendah diperoleh Kabupaten Bangli sebesar Rp.1.293.885,00. Interpretasi tersebut menyimpulkan bahwa angka pembangunan dan kegiatan investasi lebih difokuskan pada wilayah Bali selatan, sehingga terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Tabel 1.
PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2009-2013
(Dalam Jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Jembrana	1.663.345	1.739.284	1.836.900	1.945.292	2.049.927
Tabanan	2.342.711	2.475.716	2.619.688	2.774.394	2.941.821
Badung	5.528.320	5.886.369	6.280.211	6.738.308	7.170.966
Gianyar	3.187.823	3.380.513	3.609.056	3.854.011	4.101.807
Klungkung	1.240.543	1.307.889	1.383.890	1.467.352	1.551.109
Bangli	1.040.363	1.092.116	1.155.899	1.225.104	1.293.885
Karangasem	1.747.169	1.836.132	1.931.439	2.042.135	2.160.734
Buleleng	3.266.343	3.457.476	3.668.884	3.907.936	4.170.207
Denpasar	5.358.246	5.710.412	6.097.167	6.535.171	6.962.611

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan setiap daerah dengan melimpahkan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini searah dengan pernyataan yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 terkait pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan dana antara daerah dan pusat. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu perwujudan otonomi daerah yang berfokus pada bidang keuangan yang mengharuskan daerah memiliki kualitas kinerja keuangan yang baik sehingga memaksimalkan pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor publik. Tinggi rendah pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tinggi rendahnya tingkat pembangunan daerah. Kemudian pembangunan daerah secara berkelanjutan membutuhkan sumber penerimaan yang besar. Sumber-sumber penerimaan daerah yang berperan aktif dalam menunjang angka pembangunan berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Dana bagi hasil (DBH) adalah bagian dari dana perimbangan selain dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang dilimpahkan pertanggungjawabannya pada daerah bersangkutan dalam hal penyelenggaraan desentralisasi sesuai dengan keperluan daerah yang pendanaannya didasarkan pada angka persentase tertentu. Variabel dana bagi hasil digunakan dalam penelitian ini karena menggambarkan persentase pembagian hasil antara daerah dan pusat yang bersumber dari pajak dan bukan pajak sehingga pembagian hasil ini tidak mencerminkan ketergantungan daerah atas transfer dari pusat melainkan memotivasi daerah untuk memaksimalkan penerimaan daerahnya yang bersumber dari pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta penerimaan non pajak seperti sektor kehutanan, pertambangan, pariwisata, perikanan dan pertanian. DBH adalah salah satu elemen modal utama yang dijadikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan realisasi belanja daerah dan sebagai sumber dana pembangunan. Berlandaskan anggaran daerah DBH sendiri dipandang sebagai penerimaan daerah yang besaran angkanya paling berpotensi pada urutan ke-3 setelah PAD dan DAU. Kemudian elemen lain yang terkandung dalam dana perimbangan seperti DAU dan DAK tidak digunakan dalam penelitian ini karena tinggi rendah DAU hanya menggambarkan ketergantungan daerah atas transfer pusat yang artinya semakin tinggi perolehan DAU mencerminkan ketergantungan daerah akan transfer dari pusat yang semakin tinggi, sekaligus menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mandiri secara keuangan dan begitu sebaliknya DAK hanya diberikan secara spesifik untuk daerah tertentu guna mendanai

kegiatan khusus yang sifatnya diprioritaskan secara nasional kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Salah satu contoh DBH antara pusat dan daerah Provinsi Bali adalah dana perimbangan PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai dimana jumlah dana perimbangan yang diperoleh Bali sangat kecil. Mekanisme sesungguhnya yang berlaku dalam kondisi Negara berkembang pemerintah mesti mendorong pertumbuhan daerah dengan mengalokasikan anggaran 20 – 50% dari produk domestik bruto untuk dana perimbangan daerah atau Bali jika dikalikan PDB dari sektor pariwisata saja yaitu USD 2 miliar atau 22 triliun. Apabila secara riil 20 – 25 persen dengan PDB sektor pariwisata Bali mestinya memperoleh berlipat-lipat dari yang diterima sekarang yakni 557 miliar. PDB Bali yang dikumpulkan dari semua sektor untuk tahun 2008 mencapai Rp. 47,8 triliun. Keseluruhan tersebut berasal dari pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan lain-lain. Berdasarkan rumus yang diberikan di atas yaitu hak Bali adalah 20-25 persen, dengan angka paling rendah sekitar Rp. 10 triliun yang mesti didapatkan Bali (DPD RI dan Universitas Udayana, 2009).

Hasil penelitian terdahulu memperoleh simpulan bahwa DBH terbukti mampu memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi secara positif (Arifintar, 2013; Santosa, 2013; Riska dkk. 2014; Hendriwiyanto, 2015; Dewi dan Budhi, 2015). Selanjutnya dari perspektif berbeda Ronauli (2006) membuktikan bahwa DBH tidak mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Husna dan Sofia (2013).

Belanja langsung adalah salah satu bagian terpenting dari belanja daerah selain belanja tidak langsung. Belanja langsung memiliki aspek lebih luas yang terbagi atas beberapa elemen diantaranya belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja modal adalah bagian terpenting dari belanja langsung yang realisasinya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur daerah seperti fasilitas publik guna menunjang pergerakan roda perekonomian daerah yang nantinya berkontribusi pada angka pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Belanja modal diasumsikan sebagai salah satu bagian terpenting dalam belanja daerah (Kartika dan Dwirandra, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa belanja langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Babatunde dan Christopher, 2013; Chinweoke *et al.* 2014; Sumarthini dan Murjana Yasa, 2015). Selanjutnya Nworji *et al.* (2012), menyatakan bahwa alokasi dari anggaran belanja modal mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Paseki, dkk. (2014) dimana belanja langsung dinyatakan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain sumber pendanaan dan realisasi belanja pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan dimaksudkan untuk mengukur tingkat pertanggungjawaban (*accountability*) sekaligus mengetahui kemandirian finansial daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kinerja keuangan pada pemerintah daerah digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja keuangan yang baik menggambarkan

bahwa suatu daerah telah berhasil menjalankan kewajiban dari pemerintah pusat melalui pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja keuangan diukur melalui persentase hasil pembagian antara dana realisasi dengan jumlah dana yang dianggarkan. Kualitas kinerja keuangan juga menunjukkan bagaimana daerah merealisasikan dana yang dianggarkan secara efektif dan efisien.

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menarik perhatian peneliti untuk kembali menguji pengaruh dana bagi hasil dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan daerah sebagai pemoderasi guna mengkonfirmasi hasil riset terdahulu. Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Putra (2015), perbedaannya terletak pada penggunaan dana bagi hasil dan belanja langsung sebagai variabel independen.

Teori keagenan menjelaskan adanya relasi yang diasumsikan selaku kontrak perjanjian antara pihak prinsipal yang memanfaatkan jasa dari orang lain selaku agen guna mengemban suatu tugas demi mencapai kepentingan prinsipal melalui pelimpahan tanggung jawab dalam membuat keputusan kepada agen untuk memberikan performa terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Permasalahan dalam relasi keagenan mendorong lahirnya dua konflik utama yaitu: (1) Timbulnya asimetri informasi, dimana secara general agen menguasai informasi yang cakupannya sangat luas mengenai kondisi keuangan yang riil dari prinsipal. Menurut Ahmad *et al.* (2012) menyatakan bahwa asimetri informasi berkaitan dengan efektivitas arus informasi dan interaksi antara prinsipal dan agen dalam melakukan tugas tertentu. (2) Munculnya konflik kepentingan akibat

ketidaksamaan visi kedua belah pihak, dimana agen terkadang bertindak diluar dari kontrak perjanjian (tidak selaras) dengan kepentingan prinsipal.

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini terlihat pada hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga hubungan antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah daerah (agen). Tamtomo (2010) menyatakan pelimpahan tanggung jawab kepada daerah oleh pemerintah pusat ditujukan agar daerah tersebut dapat mengelola sekaligus mengatur segala bentuk urusan rumah tangganya secara mandiri selanjutnya bentuk konsekuensi dari pendelegasian tanggung jawab tersebut, maka pusat wajib mengalokasikan dana perimbangan dan segala jenis turunannya seperti DAU, DBH, dan DAK guna mendukung daerah dalam memaksimalkan pelayanan publik sekaligus sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi keperluan harian daerah.

Desentralisasi berarti pemberdayaan satu atau lebih lapisan subnasional pemerintah sebagai agen yang kemudian diminta untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan atau hanya melaksanakan tugas administrasi dari pusat (Rodden, 2006:27). Selanjutnya Bodman *et al.* (2009) menyatakan desentralisasi fiskal sebagai sejenis devolusi dari bentuk kekuasaan sekaligus pertanggungjawaban fiskal kepada daerah oleh pusat guna menurunkan atau menambah angka pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah diperoleh dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah. Fungsi utama dari desentralisasi fiskal adalah mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang lebih lama sekaligus mewujudkan sektor publik yang lebih efisien (Faridi, 2011). Maggi dan Ladurner (2009) menyatakan bahwa teori

perspektif baru terkait *Fiscal Federalism* menitikberatkan untuk memandang segenap keputusan politik yang dibuat sebagai hal yang krusial dimana hal ini terkait bagaimana pihak legislatif dan eksekutif berpikir, bertindak, dan berperan aktif sekaligus segenap kelembagaan mereka.

Menurut Mardiasmo (dalam Putra, 2015) Desentralisasi fiskal menuntut tiap-tiap daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi dengan menemukan alternatif terbaru sebagai sumber asal guna membiayai pembangunan dengan tetap menggantungkan harapan pada dukungan dana dari pusat. Desentralisasi fiskal memberikan struktur insentif yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjadi lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya fiskal namun itu tidak selalu mengarah pada pertumbuhan yang kuat karena meningkatnya kesenjangan antar daerah terutama ditingkat kapasitas pembangunan dan sumber daya (Tirtosuharto, 2010).

Desentralisasi fiskal dapat dibedakan sesuai dengan independensi tingkat pengambilan keputusan. *Pertama*, dekonsentrasi berarti penyebaran tanggung jawab dalam pemerintah pusat untuk kantor cabang daerah atau satuan administrasi regional. *Kedua*, delegasi mengacu pada keadaan yang memaksa pemerintah daerah bertindak selaku agen untuk kepentingan pusat dengan menyelenggarakan fungsi dan tugas atas nama pusat. *Ketiga*, devolusi mengacu pada kondisi yang bukan hanya sebatas wewenang dalam membuat keputusan mengenai langkah-langkah selanjutnya tetapi juga penyelenggaraannya berada di tangan pemerintah daerah (Bird dan Vaillancourt, 1998:3).

Tujuan umum dari program desentralisasi fiskal Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional antara pusat dan daerah, meningkatkan struktur fiskal pemerintah secara menyeluruh, untuk memaksimalkan akuntabilitas dan transparansi, memperluas partisipasi pihak konstituen dalam mengambil tindakan di tingkat regional, menurunkan senjangan fiskal antar daerah dan menjamin pelayanan publik untuk warga di segenap daerah bersangkutan, memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia dan mendukung stabilitas ekonomi makro (Alm *et al.*, 2004:137).

DBH adalah salah satu turunan dana perimbangan selain dari DAU dan DAK yang diperbantukan kepada daerah oleh pusat dengan tujuan memaksimalkan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah (Nehen, 2012:411). Semakin tinggi DBH maka ekspektasi tingkat pembangunan daerah semakin tinggi sehingga DBH berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini juga didukung oleh penelitian Pujiati (2008), Santosa (2013), Riska, dkk.(2014), Dewi dan Budhi (2015) dan Hendriwiyanto (2015). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya tersebut, berikut hipotesis pertama yang dapat dirumuskan:

H₁: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Bose dan Osborn (2007), menyatakan bahwa realisasi belanja modal mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan dimana pertumbuhan ekonomi dalam penelitian tersebut diproksikan melalui GDP. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Chude dan Chude (2013) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi,

hal ini juga dibuktikan dalam penelitian Dewi dan Budhi (2015) yang menyatakan bahwa belanja langsung terbukti mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini membuktikan bahwa tingginya realisasi belanja langsung merupakan indikator penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diperoleh hipotesis kedua berikut ini:

H₂: Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Dana Bagi Hasil adalah turunan dari dana perimbangan sekaligus sumber penerimaan potensial selain PAD yang diterima daerah melalui transfer oleh pusat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penerimaan (DBH) diharapkan mampu berjalan secara maksimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu indikator yang mewadahi antara jumlah penerimaan di lapangan dapat dilihat melalui kinerja keuangannya. Menurut Sumarjo (2010) *intergovernmental revenue* (penerimaan dari transfer pusat ke daerah) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Selanjutnya Hamzah (2008) membuktikan bahwa kinerja keuangan daerah mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kinerja Keuangan Daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Belanja langsung adalah salah satu konsumsi daerah selain belanja tidak langsung yang difokuskan pada pembangunan fasilitas publik guna menunjang keberlangsungan roda perekonomian daerah yang nantinya berperan dalam

menentukan tinggi rendah angka pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini senada dengan hasil temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa belanja langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Adi, 2006; Bose dan Osborn, 2007; Chude dan Chude, 2013; Dewi dan Budhi, 2015). Kemudian penelitian Nugroho (2012) membuktikan bahwa secara tidak langsung belanja modal (bagian dari belanja langsung) memengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara positif dengan PAD sebagai variabel intervening. Kinerja keuangan diasumsikan sebagai suatu pencapaian hasil yang diperoleh atas kinerja pada sektor keuangan (dalam hal ini daerah) yang mencakup segala bidang pembiayaan (belanja dan/atau konsumsi) dan sumber penerimaan melalui indikator keuangan sebagai mistar ukurnya. Kinerja keuangan digunakan sebagai media untuk mengukur besarnya pengaruh belanja daerah khususnya belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui rasio efisiensi dengan cara menghitung besarnya realisasi pengeluaran atas total realisasi penerimaan (Hamzah, 2010; Kawa, 2011). Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H₄: Kinerja Keuangan Daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Belanja Langsung pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Pemilihan lokasi diselenggarakan pada Kabupaten/Kota di Bali dengan mencari data dana bagi hasil, belanja langsung, kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi tahun 2009-2013. Jenis data yang dipakai berdasarkan sifatnya adalah data kuantitatif. Data diperoleh dari PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali atas

dasar harga konstan 2000 kemudian realisasi anggaran DBH, realisasi belanja langsung dan data realisasi kinerja keuangan daerah pada tahun 2009 sampai dengan 2013.

DBH merupakan elemen pendapatan yang berasal dari APBN yang ditransfer oleh pusat untuk daerah yang didasarkan pada satuan persentase tertentu guna memenuhi segala keperluan daerah dalam mencapai penyelenggaraan desentralisasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013 dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan penyelenggaraan kegiatan dan/atau program. Belanja langsung terbagi atas tiga bagian yaitu belanja modal, pegawai, dan barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

Kinerja keuangan diasumsikan sebagai suatu pencapaian hasil yang diperoleh atas kinerja pada sektor keuangan (dalam hal ini daerah) yang mencakup segala bidang pembiayaan (belanja dan/atau konsumsi) dan sumber penerimaan melalui indikator keuangan sebagai mistar ukurnya yang ditetapkan melalui regulasi atau kebijakan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui beberapa rasio seperti rasio efektivitas, kemandirian, efisiensi, dan keserasian dan pertumbuhan tetapi pengukuran kinerja keuangan pada penelitian ini lebih difokuskan pada rasio efisiensi. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila memperoleh hasil (output) dengan biaya (input) paling minimal diperoleh hasil yang diharapkan. Menurut Kepmendagri Nomor 690.900 327 tahun 1996 terkait acuan nilai pada kinerja

keuangan menyatakan bahwa untuk nilai $> 100\%$ dikatakan tidak efisien, kemudian angka pada kisaran 90-100% dikatakan kurang efisien, selanjutnya pada kisaran 80-90% dikatakan cukup efisien, 60-80% efisien, dan $< 60\%$ sangat efisien. Pertumbuhan Ekonomi merupakan totalitas nilai jasa dan/atau barang secara menyeluruh yang dicapai dari serangkaian aktivitas perekonomian yang dilakukan di daerah diproksikan dengan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2009-2013 dinyatakan dalam satuan persentase. Populasi yang digunakan adalah Provinsi Bali. Penentuan sampel diselenggarakan melalui metode sampling jenuh. Sampel penelitian terdiri dari Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali dengan cakupan 8 kabupaten dan 1 kota madya dengan total keseluruhan 9 wilayah kabupaten/kota. Data yang dikumpulkan berjumlah 45 amatan yang terbagi atas 9 kabupaten/kota selama 5 tahun.

Metode pengumpulan data difokuskan pada observasi non partisipan. Teknik analisis data di bagi dalam beberapa tahap yaitu: statistik deskriptif, uji asumsi klasik, *Moderated Regression Analysis (MRA)*, koefisien determinasi, dan uji parsial (t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif menggambarkan suatu data penelitian seacara umum dengan memaparkan banyaknya sampel yang dipakai, nilai rata-rata, terkecil, terbesar, dan standar deviasi. Hasil analisis dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DBH	45	17150,97	186560,09	49818,68	44861,11569
BL	45	117639,43	1267236	331632,3	230539,16470
KKD	45	79,75	120,12	91,5613	5,52629
PE	45	4,57	7,30	5,9580	0,63393
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 2 diatas, variabel DBH mencapai nilai terendah sebesar 17.150,97 Juta dan nilai tertinggi sebesar 186.560,09 Juta dengan nilai rata-rata sebesar 49.818,68 Juta. Standar deviasi untuk DBH sebesar 44.861,11569. Artinya terjadi penyimpangan nilai DBH yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 44.861,11569. Selanjutnya Belanja Langsung memiliki nilai terendah sebesar 117.639,43 Juta dan nilai tertinggi sebesar 1.267.236 Juta dengan nilai rata-rata sebesar 331.632,3 Juta. Standar deviasi untuk Belanja Langsung sebesar 230.539,16470. Artinya terjadi penyimpangan nilai Belanja Langsung yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 230.539,16470.

Variabel Kinerja Keuangan Daerah (KKD) memperoleh nilai terkecil dengan angka 79,75% dan nilai tertinggi pada kisaran 120,12% dengan rata-rata senilai 91,56%. Standar deviasi untuk Kinerja Keuangan Daerah sebesar 5,52629. Artinya terjadi penyimpangan nilai Kinerja Keuangan Daerah yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 5,52629. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memperoleh nilai terendah pada angka 4,57% dan tertinggi senilai 7,30% kemudian rata-rata diperoleh senilai 5,9580%. Standar deviasi untuk Pertumbuhan

Ekonomi sebesar 0,63393. Artinya terjadi penyimpangan nilai Pertumbuhan Ekonomi yang diteliti terhadap nilai rata-rata sejumlah 0,63393.

Uji normalitas ditujukan untuk menjelaskan normal atau tidaknya distribusi data pada model regresi yang sedang diuji. Uji normalitas dalam penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan rasio skewness dan kurtosis. Hasil uji skewness dan kurtosis tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3 membuktikan nilai rasio skewnes yang diperoleh sebesar -0,42 (diperoleh dari -0,150/0,354) sedangkan rasio kurtosis yang diperoleh sebesar 0,15 (diperoleh dari 0,109/0,695). Hal ini berarti data dalam model yang diteliti terdistribusi secara normal karena nilai rasio skewnes dan kurtosis berada diantara -2 hingga +2. Pengujian multikolinearitas bertujuan mencari tahu ada tidaknya korelasi antar variabel bebas di dalam model regresi. Hasil pengujian data dapat disimak pada Tabel 4.

Tabel 3.
Uji Normalitas

	Skewness		Kurtosis	
	Statistik	SE	Statistik	SE
Unstandardized Residual Valid N (listwise)	-0,150	0,354	0,109	0,695

Sumber: Data Diolah, 2016

Tabel 4 membuktikan semua variabel mencapai nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
DBH	0,633	1,579
BL	0,688	1,454
KKD	0,887	1,127

Sumber: Data diolah, 2016

Uji heteroskedastisitas menguji kemungkinan adanya perbedaan varians dari residual antar pengamatan yang satu dan lainnya dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat disimak pada Tabel 5. Uji Glejser pada Tabel 5, nilai signifikansi untuk seluruh variabel bebas terhadap nilai absolute residual $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan data penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	0,008	0,766		0,011	0,991
DBH	-8,3E-007	0,000	-0,136	-0,700	0,488
BL	6,18E-008	0,000	0,052	0,279	0,782
KKD	0,004	0,008	0,077	0,471	0,640

Sumber: Data diolah, 2016

Regresi linear berganda bertujuan mencari tahu hubungan antara pengaruh DBH dan Belanja Langsung pada Pertumbuhan Ekonomi. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk rekapitulasi pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5,313	0,122		43,426	0,000
DBH (X ₁)	6,18E-006	0,000	0,437	3,354	0,002
BL (X ₂)	1,02E-006	0,000	0,370	2,834	0,007
R					0,713
R ²					0,509
Adjusted R ²					0,485

Sumber: Data Diolah, 2016

Persamaan regresi linear berganda diperoleh dengan mengacu pada koefisien regresi Pada Tabel 6, yang dipaparkan sebagai berikut:

$$Y = 5,313 + 6,18E-006 X_1 + 1,02E-006 X_2 \dots\dots\dots (1)$$

Uji koefisien determinasi digunakan menentukan proporsi variasi dalam variabel bebas. Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai R² sejumlah 0,509 artinya bahwa 50,9% perubahan (naik turun) yang terjadi pada Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh DBH dan Belanja Langsung sementara sisanya sebesar 49,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

Uji statistik t menggambarkan secara individual seberapa jauh pengaruh variabel indepeden yang terdiri dari DBH memiliki tingkat signifikan sejumlah $0,002 < 0,05$. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang artinya DBH berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Langsung memiliki tingkat signifikan senilai $0,007 < 0,05$. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang artinya Belanja Langsung berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji t disajikan dalam Tabel 6.

Berdasarkan hasil uji t dapat dilakukan pembahasan atas hipotesis yang telah diajukan peneliti dalam penelitian ini.

H₁: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya menunjukkan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ yang menjelaskan bahwa DBH terbukti memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi secara positif dan signifikan. Penelitian ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Pujiati (2008), Santosa (2013), Riska, dkk.(2014), Dewi dan Budhi (2015) dan Hendriwiyanto (2015), yang menyatakan bahwa DBH mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan dan hasil ini menolak hipotesis H₀ sekaligus menerima H₁ yang menyatakan DBH berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Hal ini membuktikan bahwa transfer dana perimbangan berupa dana bagi hasil telah mencapai tujuan dari desentralisasi fiskal yaitu memaksimalkan angka pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya sumber penerimaan DBH yang berasal dari sektor pajak (PPh, PBB, BPHTB) dan bukan pajak (kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata) adalah alasan kuat yang mendasari pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Alasan kedua adalah Dana Perimbangan menjadi indikator potensial selain PAD dan DAU yang telah dialokasikan secara maksimal dalam realisasi anggaran daerah untuk membiayai pembangunan fasilitas publik guna menunjang pergerakan roda perekonomian.

H₂: Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ yang menjelaskan bahwa Belanja Langsung memengaruhi

Pertumbuhan Ekonomi secara positif dan signifikan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Dewi dan Budhi (2015) yang menyatakan bahwa belanja langsung secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan.

Pernyataan yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian Adi (2006) dimana bagian dari belanja langsung yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kata lain jika pengeluaran pembangunan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan begitu sebaliknya. Hal ini juga didukung oleh penelitian Bose dan Osborn (2007) dan Chude dan Chude (2013). Hal ini membuktikan bahwa tingginya realisasi Belanja Langsung merupakan indikator penting selain Belanja Tidak Langsung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain Pemerintah Daerah telah berhasil mencapai tujuan dari otonomi daerah sekaligus desentralisasi fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara maksimal dengan pengelolaan yang independen yang didanai melalui potensi-potensi penerimaan daerah tersebut.

Hasil ini secara sekaligus menolak H_0 dan menerima H_2 yang menyatakan Belanja Langsung berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Analisis regresi moderasi merupakan analisis regresi linier yang digunakan untuk menganalisis model regresi yang dalam persamaannya terdapat unsur interaksi, yaitu perkalian antara dua atau lebih variabel independen. Pada penelitian ini analisis regresi moderasi digunakan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah dalam memoderasi hubungan antara variabel DBH dan belanja

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari analisis regresi moderasi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Regresi Moderasi

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5,291	,126		42,149	0,000
DBH*KKD	7,483E-008	0,000	0,456	3,563	0,001
BL*KKD	1,102E-008	0,000	0,355	2,771	0,008
R					0,713
R ²					0,508
Adjusted R ²					0,484

Sumber: Data Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 7 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 5,291 + 7,483E-008 \text{ DBH} * \text{KKD} + 1,102E-008 \text{ BL} * \text{KKD} \dots \dots \dots (2)$$

Koefisien determinasi pada model regresi moderasi dilihat dari nilai R². Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai R² sejumlah 0,508 yang berarti bahwa 50,8% perubahan (naik turun) yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dana bagi hasil, belanja langsung, kinerja keuangan daerah sebagai pemoderasi sementara sisanya sebesar 49,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

Uji Parsial (t) pada model regresi moderasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja keuangan daerah dalam memoderasi pengaruh dana bagi hasil, belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa interaksi antara dana bagi hasil dengan kinerja keuangan daerah (DBH*KKD) memiliki tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang artinya kinerja

keuangan daerah mampu memoderasi pengaruh dana bagi hasil pada pertumbuhan ekonomi. Interaksi belanja langsung dengan kinerja keuangan daerah (BL*KKD) memiliki tingkat signifikan sebesar $0,008 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya Kinerja Keuangan Daerah mampu memoderasi pengaruh belanja langsung pada Pertumbuhan Ekonomi.

H₃: Kinerja Keuangan Daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Dana Bagi Hasil pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Daerah dalam hal ini mampu meningkatkan pengaruh DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini menerima hipotesis H₃ yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Daerah mampu memoderasi (meningkatkan) pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Oleh karena secara parsial Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi dan juga mampu memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) pada Pertumbuhan Ekonomi, maka variabel Kinerja Keuangan Daerah dapat dikategorikan sebagai variabel moderasi.

H₄: Kinerja Keuangan Daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Belanja Langsung pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ yang menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh dan memoderasi hubungan Belanja Langsung dengan Pertumbuhan

Ekonomi. Hasil ini menerima hipotesis H_4 yang menyatakan Kinerja Keuangan Daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Belanja Langsung pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa realisasi Belanja Langsung menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah selain dari realisasi belanja tidak langsung. Hal ini dilandasi oleh tujuan realisasi Belanja Langsung untuk memaksimalkan perbaikan dan penyediaan fasilitas publik melalui belanja modal, serta memenuhi kebutuhan daerah lainnya seperti belanja barang dan jasa serta pegawai. Pernyataan ini juga sekaligus membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali selama 5 tahun (2009-2013) sudah berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Kinerja Keuangan Daerah mampu memoderasi (meningkatkan) pengaruh DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Kinerja Keuangan Daerah mampu memoderasi (meningkatkan) pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat diajukan adalah Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah periode tahun terbaru dan menggunakan variabel penelitian lain seperti Belanja Tidak Langsung atau

sumber-sumber penerimaan daerah lainnya selain Dana Bagi Hasil, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian selanjutnya, selain itu diharapkan menggunakan lingkup objek penelitian yang lebih luas (daerah lain) untuk dibandingkan dengan kondisi perekonomian di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Adi, P. H. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Ahmad, A. R., Alan, F., and Moonsamy, N. 2012. Analysis of Government-University Relationship from the Perspective of Agency Theory. *Journal of Education and Practice*, 3(6).
- Alm, J., Vazquez, J. M., and Indrawati, S. M. 2004. *Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and The Rebuilding of Indonesia: The Big Bang Program and It's Economic Consequences*. Edward Elgar Publishing, Inc.
- Arifintar, Mastar. 2013. Pengaruh PAD, DBH Pajak, DAU, DAK, Jumlah Tenaga Kerja dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Solo Raya Tahun 2004-2011. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Babatunde, A., and Christopher, R. O. 2013. The Impact of Public Capital Expenditure and Economic Growth in Nigeria. *Global Journal of Economic and Finance*, 2(1), pp: 1-11.
- Bird, R. M., and Vaillancourt, F. 1998. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: University Press.
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach*. MRG@UQ Discussion Paper, School of Economics, University of Queensland.
- Bose, N., Haque, M.E., and Osborn, D.R. 2007. Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries. *The Manchester School*, 75(5), pp: 533-556.
- Chinweoke, N., Ray, N., and Paschal, N. O. 2014. Impact of Government Expenditure on Nigeria's Economic Growth (1992-2011). *The Macroeconomic Review*, 3(7), pp: 79-87.

- Chude, N. P., and Chude, D. I. 2013. Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Business and Management Review*, 1(4), pp: 64-71.
- Dewi, Nuryanti., dan Budhi, Made, K. S. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(11), pp: 1391-1420.
- DPD RI dan Universitas Udayana. 2009. Hubungan Pemerintah Pusat – Daerah dan Implikasinya Terhadap Hubungan Keuangan, Pelayanan Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Ekonomi. *Laporan Penelitian*. Tersedia pada: <http://www.lawcenter.dpd.go.id>. Diunduh tanggal 23 November 2015.
- Edison, San. 2015. Bandara di Buleleng Percepat Pemerataan Pembangunan. Tersedia pada: <http://balitribune.co.id/2015/05/bandara-di-buleleng-percepat-pemerataan-pembangunan/>. Diakses tanggal 24 Desember 2015.
- Faridi, M. Z. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth : Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), pp: 1-33.
- Hamzah, A. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur. Universitas Trunojoyo.
- Hendriwiyanto, G. 2015. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja langsung Dengan Pertumbuhan ekonomi Sebagai Variabel Mediasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Husna, Asmaul., dan Sofia, Myrna. 2013. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *JEMI*, 4(2), pp: 1-12.
- Indrabayu, Wayan. 2013. Dampak Semu Eksploitasi Kawasan Bali Selatan. Tersedia pada: <http://balebengong.net/kabar-anyar/2013/08/19/dampak-semu-eksploitasi-kawasan-bali-selatan.html#>. Diakses tanggal 24 Desember 2015.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360.
- Kandia, Nyoman. 2013. Infrastruktur di Bali Utara Dinilai Belum Memadai. Tersedia pada: <http://beritadewata.com/Pariwisata/Berita-Pariwisata/Infrastruktur-di-Bali-Utara-Dinilai-Belum-Memadai.html>. Diakses tanggal 24 Desember 2015.

- Kartika Jaya, I Putu., Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Pertumbuhan ekonomi Dengan Belanja langsung Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), pp: 79-92.
- Kawa, E. P. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 327. 1996. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Maggi, Eva Maria dan Ladurner, Ulrich. 2009. Federal Features and Financial Decentralization. Inhouse Seminar. Eurac Research.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Nehen, Ketut. 2012. *Perekonomian Indonesia*, Denpasar: Udayana University Press.
- Nugroho, F. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Nworji, I. D., Okwu, A. T., Tomothy C, O., and Nworji. L. O. 2012. Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal of Management Science and Business Research*, 1(7), pp: 1-15.
- Paseki, M. G., Naukoko, A., dan Wauran, P. 2014. Pengaruh DAU dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *JBIE*, 14(3), pp: 30-42.
- Pujiati, Amin. 2008. Analisis Belanja langsung di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, 13(2), pp: 61-70.
- Putra, Agus. 2015. Kinerja Keuangan Sebagai Pemoderasi Pengaruh PAD dan DAU Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Riska, A. A. I., Ahmidati, F. N., Lolowang, N. H., dan Anggraini, R. M. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional tahun 2008-2012.

[http://www.academia.edu/8095829/Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional](http://www.academia.edu/8095829/Pengaruh_PAD_dan_dana_perimbangan_terhadap_Pertumbuhan_Ekonomi_Regional). Diakses Tanggal 23 November 2015.

- Rodden, J. A. 2006. *Hamilton's Paradox: The Promise and Peril of Fiscal Federalism*. Cambridge: University Press.
- Ronauli. 2006. Analisa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Disparitas Pendapatan Daerah Pasca Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Tersedia pada: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=109450&lokasi=lokal>. Diakses tanggal 24 Desember 2015.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Pertumbuhan ekonomi 33 Provinsi di Indoensia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5(2), pp: 130-143.
- Sumarthini, A., dan Murjana Yasa, W. 2015. Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja langsung Melalui Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(4), pp: 258-271.
- Tamtomo, Edi. 2010. Analisis Pertumbuhan Daerah di Era Desentralisasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tirtosuharto, D. 2010. The Impact of Fiscal Decentralization and State Allocative Efficiency on Regional Growth in Indonesia. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 1(2), pp: 287-307.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.